

BAB VI.

Hukum Adat Bangsa-Bangsa.

1. Konflik antar komunitas regional; perjanjian dan aliansi.

Meskipun informasi yang diberikan dalam paragraf 1 Bab II memberikan kesan bahwa pada zaman dahulu terdapat banyak pertempuran yang mengakibatkan antara lain negara-negara lama di Peling harus melepaskan kemerdekaan mereka dan bergabung dengan Banggai Raya, pada masa-masa selanjutnya hal ini tampaknya telah berakhir, setidaknya untuk Peling. Kruyt menyebutkan bahwa menurut kesaksian umum, perang antara penduduk dua wilayah di Kepulauan tidak pernah terjadi.¹ Di sisi lain, kemerdekaan beberapa wilayah yang memisahkan diri disertai dengan pertempuran (misalnya, pemisahan Ponding-Ponding dan Tatakalai dari Tinangkung).

Namun, perlawanan dari para kepala daerah

terhadap raja pasti telah terjadi; Kruyt melaporkan bahwa *basalo* Apal tidak mau mendengarkan perintah sang pangeran ketika di bawah tekanan pemerintah, ia melarangnya menjual orang sebagai budak kepada Una-Una di Teluk Tomini.² Bagaimana perlawanan ini berakhir, dan dengan cara apa sang pangeran mengakhirinya, tidak disebutkan. Kebetulan, selama penelitian saya, saya tidak menemukan jejak pemberontakan semacam itu maupun konflik bersenjata antara dua komunitas regional.

Berbeda halnya di Daratan Utama. Di Vogelkop³ disebutkan tentang pertempuran antara penduduk Mantok dan penduduk Basama; Mantok sekarang, menurut penelitian saya, adalah sebuah desa milik *mian* Bula, salah satu kelompok keluarga dalam komunitas regional

¹ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 249.

² Kruyt, *Vorsten*, hlm. 617.

³ Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 342 catatan 1.

Tanoturan; Basama adalah unit yang terletak di sebelah baratnya. Pastilah itu adalah perselisihan antara para pemimpin kelompok Mantok dan Basama; kita mungkin tidak sedang membahas perselisihan antara dua komunitas regional melainkan antara sebagian dari mereka. Tempat yang dikenal sebagai medan perang adalah *Asa'an* (bahasa Sian: batu asah untuk pedang); perang tersebut berlangsung selama tiga tahun dan berakhir dengan kematian *tonggol* Basama. Dari durasi yang disebutkan, kita dapat menyimpulkan bahwa ada masa-masa pertempuran kecil tetapi kapan terjadinya tidak disebutkan. Apa penyebab pertempuran itu tidak dapat (atau mau?) diceritakan kepada Kruyt.

Namun, penyebab perang lainnya sering kali saya sebutkan sebagai sengketa perbatasan. Misalnya, terdapat konflik antara kepala daerah Kintom dan Mendono; dan, di sisi lain daerah aliran sungai, antara Lingketiing dan Pokouhan di satu sisi dan Basabungan dan Lambangan di sisi lain. (Perlu dicatat bahwa pasangan pertama berada di bawah kepala daerah Kintom, pasangan kedua di bawah kepala daerah Mendono).

Konflik terakhir ini, di sisi utara daerah aliran sungai, meletus tiga kali, terakhir kali terjadi sesaat sebelum tahun 1908 ketika ben-trokan berdarah dicegah oleh campur tangan seorang pejabat bea cukai pemerintah yang sedang bertugas.

Perselisihan lain dilaporkan kepada saya antara Mendono dan Nambo; itu bukan masalah perbatasan karena kedua komunitas daerah tersebut tidak berbatasan satu sama lain. Akibat penghinaan terhadap seorang pria Mendono oleh sepupunya yang menikah di Nambo, terjadi pertengkaran antara dua keluarga. Akhirnya hal ini menyebabkan perang antara dua

komunitas daerah. Mereka memasuki wilayah masing-masing dan di kedua belah pihak beberapa orang tewas; pada akhirnya Nambo kehilangan satu nyawa lebih banyak daripada Mendono. Pemegang pos yang bergegas ke tempat kejadian (demikianlah keadaannya setelah tahun 1880) dan *i* kemudian menyelesaikan masalah tersebut sedemikian rupa sehingga Mendono harus membayar denda kepada Nambo sebesar empat puluh blok barang, sebagai tanda perdamaian untuk satu nyawa tersebut; seluruh masyarakat daerah membayar denda ini. Barang-barang tersebut kemudian dibawa secara seremonial ke Lontio (masyarakat daerah yang terletak di antara pihak-pihak yang bertikai), di mana barang-barang tersebut diserahkan kepada masyarakat Nambo di hadapan pemegang pos dan *utusan*; juga dinyatakan bahwa dendam bersama telah berakhir. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa wilayah Lontio di antara keduanya digunakan sebagai wilayah netral untuk mengakhiri pertempuran.

Akhirnya, penduduk Lingketiing dan Duhian terlibat dalam banyak peperangan yang ditujukan terhadap kelompok lain maupun terhadap satu sama lain. Namun, baik desa Lingketiing maupun desa Duhian tidak pernah berperang satu sama lain karena semua perselisihan internal yang dapat memicunya diselesaikan oleh *daka'nyo* atau *mian kopian*.⁴ Penyebab banyaknya peperangan di antara kelompok-kelompok ini kemungkinan adalah pencarian damar, tetapi Kruyt meragukan hal ini. Namun, Goedhart mengajukan pertanyaan yang sama dengan penyebab pembunuhan orang Loinang yang dilakukan pada masanya dan selanjutnya menyatakan bahwa pertempuran antara penduduk pegunungan Lingketiing dan Duhian biasanya disebabkan oleh perlintasan wilayah satu sama lain saat mengangkut damar atau rotan.⁵ Hal ini

⁴ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 431.

⁵ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 479.

sesuai dengan informasi Tangkilisan yang mengatakan bahwa perlintasan batas bersama merupakan satu-satunya alasan mereka berpeperang satu sama lain; perlintasan batas seperti itu juga sering terjadi saat berburu kerbau chamois (anoa).

Kruyt lebih lanjut menyebutkan bahwa orang-orang pergi setiap tahun untuk mengumpulkan satu atau lebih kepala (madi: mangae) yang dianggap perlu untuk tetap sehat dan agar panen berhasil.⁶ Orang-orang Lingketi sering pergi ke Boalemo (bagian utara Vogelkop) sedangkan orang-orang Duhian sering mencari mangsa di antara suku To Wana, sebuah suku di subdivisi Kolonedale. Suku-suku tersebut tidak tinggal diam dan berulang kali datang untuk membalas dendam di Loinang tetapi mereka tidak sampai ke Lingketi. Di sini, orang-orang terutama diganggu oleh orang-orang dari Lambangan (bawahan *bosanyo* Mendono) yang pernah membakar habis desa Pinapuan (madi: tempat desa itu dibakar).

Peristiwa khusus di Lingketi yang membutuhkan kepala adalah kematian dakanyo atau salah satu *tonggol* atau seseorang dari keluarga (dekat?) mereka. Kemudian, orang-orang Lingketi sering pergi untuk mendapatkan kepala dari kelompok Duhian tetapi mereka sama sekali tidak terikat pada "wilayah operasional" ini: lagipula, seseorang bisa pergi dan mendapatkan kepala di mana saja asalkan bukan dari sesama bawahan kepala daerah Kintom.

Di halaman 95, pasukan kecil yang berada di bawah kendali kepala daerah Lingketi telah dibahas. Menurut Tangkilisan, ada dua *talenga* di sini, satu *saga*, dua *pongkeali*, dan satu *panjolo*; ia mengatakan bahwa *talenga* adalah pemimpin tetapi pangkatnya lebih rendah daripada *tonggol* tetapi lebih tinggi daripada

langka-langka. Jika orang asing telah memasuki wilayah Lingketi, tugas *talenga*, bersama rekan-rekan prajuritnya, adalah mengusir dan mungkin membunuh mereka (bahwa *talenga* juga harus bertindak sebagai pelaksana hukuman telah ditunjukkan di hlm. 158 ayat). Para prajurit yang ikut dipanggil untuk sega-sega oleh Kruyt.

Baik di Lingketi maupun di Duhian, terdapat tanda-tanda eksternal yang menunjukkan berapa banyak kepala yang telah diambil oleh salah satu prajurit; pemberian gelar tersebut (Kruyt berbicara tentang diangkat menjadi ksatria pemberani) berlangsung dalam sebuah pesta besar yang diadakan ketika pasukan kembali setelah ekspedisi yang sukses. Penghargaan tersebut berupa selendang berwarna tertentu, terkadang dihiasi rumbai, yang kemungkinan di dalamnya terdapat satu atau dua gading rusa.⁷

Kruyt juga menyebutkan penggunaan orang-orang Lingketi sebagai pasukan disiplin oleh kepala daerah Kintom yaitu untuk menghukum desa atau wilayah yang telah menimbulkan ketidaksenangan terhadap tuannya dengan satu atau lain cara.⁸

Informasi mengenai hukum perdamaian sangat terbatas: Kruyt hanya menyebutkan bahwa setelah perang tahunan antara Lingketi dan Duhian, perdamaian juga disepakati setiap tahun.⁹ Kapan perdamaian ini terjadi, atau apakah perdamaian ini berkaitan dengan pertanian atau kegiatan berkala lainnya, tidak disebutkan. Namun, ketika waktu itu tiba beberapa orang dari kelompok Duhian (madi: *mian kopian* = pembawa damai; apakah *mian kopian*, ketua kelompok Duhian, juga ada di sana?) pergi ke *daka'nyo* Lingketi (tidak pernah sebaliknya?). Di sana, antara lain hi-

⁶ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 433; 332. *Ibid.* *To Wana di Sulawesi Timur*, T.B.G. 70 (1930), hlm. 404; 506/507.

⁷ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 443/444; 433/434.

⁸ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 433.

⁹ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 446.

dangan disajikan untuk memohon *balakat to-mundo Kintom* (kekuatan magis leluhur) dan terkadang bahkan balakat sultan Talinate (= Ternate) dan untuk bersumpah menjaga perdamaian. Namun, setidaknya menurut orang-orang Lingketing, selalu orang-orang Duhian yang, tak lama setelah perdamaian ini tercapai, kembali memulai peperangan dan dengan demikian melanggar perjanjian suci yang telah dibuat.

Tangkilisan juga menyebutkan bahwa mian kopian dan *tuma nu daka'nyo* bertindak sebagai duta besar khususnya untuk berdamai dengan musuh; oleh karena itu, mereka dianggap oleh kelompok lain sebagai teman mereka dan tidak diserang atau dibunuh jika mereka memasuki wilayah musuh. Agaknya, *milinu* tidak menikmati hak istimewa ini; lagipula, ia hanya diizinkan untuk bergerak bebas di antara rakyat *daka'nyo* sendiri, dihormati oleh semua orang, dan harus diberi makanan dan perbekalan oleh semua rakyat, tetapi tidak diketahui apakah ia berhak atas perlakuan yang sama jika ia berada di wilayah musuh.

Tua'nyo (lihat hlm. 99) juga dapat dianggap sebagai duta besar *daka'nyo* di tempat lain, yang bertindak di luar Lingketing sebagai kepala atas rakyat yang menetap di daerah tersebut.

Tidak ada data tentang ungkapan lain dari hukum perdamaian (waktu atau perayaan di mana seseorang tidak diizinkan untuk saling menyerang; tempat bebas atau wilayah netral; keramahmatan) kecuali yang disebutkan di atas.

Goedhart melaporkan intervensi pemerintah pusat kepangeranan dalam perselisihan antar komunitas hukum; misalnya, pemerintah Banggai mengambil keputusan tak lama sebelum tahun 1908 dalam perselisihan antara Ling-

keting dan Duhian mengenai wilayah pengumpulan damar; penulis yang sama menyebutkan bahwa jika terjadi perselisihan antar komunitas hukum, *jogugu* sendiri yang pergi ke sana untuk menyelesaikan masalah tersebut.¹⁰

Sebagai ungkapan sebuah perjanjian kita dapat mempertimbangkan bantuan yang dijanjikan Lingketing kepada Pokouan ketika Pokouan terlibat konflik bersenjata dengan Basabungan dan Lambangan: orang-orang Lingketing yang mungkin memiliki beberapa urusan dengan Basabungan, akan menyerang tempat ini dari darat dan membakar rumah-rumah (gemutu, serat aren, telah dikumpulkan) sementara Pokouan akan melancarkan serangan melalui laut.¹¹

Saya tidak dapat menemukan bentuk perjanjian lain (dukungan timbal balik melawan musuh bersama; kesepakatan yang dibuat di semua bidang lain yang memungkinkan antara para kepala masyarakat hukum) tetapi perjanjian-perjanjian itu pasti ada. Kita dapat memikirkan hubungan antara masyarakat hukum Bugis di Bunta di satu sisi dan kepala daerah Tangkiang dalam fungsinya sebagai penguasa tertinggi atas mian Duhian di sisi lain. Tak lama setelah kedatangan imigran Bugis pertama, beberapa pengikut mereka dibunuh oleh orang-orang dari Duhian. Kepala suku Bugis sangat marah atas hal ini dan kembali ke Togean sementara ia memberi tahu kepala daerah Tangkiang saat itu bahwa ia hanya akan kembali setelah ia memulihkan perdamaian dan ketertiban dan bahwa ia akan mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya kembali. Kepala daerah menemukan alasan ini untuk menangkap dan membunuh penduduk pegunungan yang bersalah dengan tangannya sendiri; kemudian ia secara pribadi pergi ke Togean untuk meminta Bunai, kepala suku Bugis,

¹⁰ Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 479; 444.

¹¹ Memorie.

untuk kembali karena pembunuhan itu telah ditebus, sambil berjanji untuk selalu menjaga ketertiban dan kedamaian agar orang Bugis tidak akan diganggu lagi dalam permukiman mereka.

Bukanlah tradisi bahwa distrik Lipuadino di Lolantang muncul dari sebuah aliansi.

Tidak ada data yang tersedia tentang bagaimana aliansi itu terbentuk dan tentang kemungkinan mantra yang terkait dengannya.

2. Hubungan Banggai dengan kerajaan-kerajaan lain. Ketidakamanan di masa lalu.

"Pemerintah Banggai sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan kepangeranan (provinsi Tojo dan Bungku); tidak ada ikatan keluarga juga", menurut Goedhart.¹² Pada zaman dahulu, hal ini berbeda, setidaknya berkaitan dengan Bungku, mungkin karena menjadi rekan vasal dari penguasa yang sama. Dalam tradisi Bungku (bukan di Banggai) diingat adanya sebuah kontrak yang dibuat antara pangeran Banggai, Abu Kasim (yang kami tempatkan dari tahun 1741 hingga 1773) dan pangeran Bungku saat itu, yang berlangsung di hadapan Sultan Amir Ternate, yang berkuasa hingga tahun 1751. Tahun dan tanggal dokumen tersebut tidak saya ketahui, tetapi oleh karena itu pasti jatuh antara tahun 1741 dan 1751. Kebetulan, sayangnya saya belum berhasil mendapatkan dokumen aslinya (mungkin dimiliki oleh seorang raja Bungku yang diasingkan). Menurut kepala sub-departemen Kolonedale (Bungku dan Mori) saat itu perjanjian tersebut memuat tujuh poin. Pertama, dinyatakan adanya perdamaian antara pihak-pihak yang berkontrak (jadi kemungkinan besar sebelumnya pernah terjadi perang). Kemudian terdapat beberapa ketentuan tentang

kasus-kasus di mana warga dari salah satu provinsi yang berkontrak datang untuk berdagang di provinsi lain dan terbunuh di sana; dan tentang penggunaan orang asing untuk melakukan aksi balas dendam di salah satu dari dua provinsi tersebut. Lebih lanjut, tidak ada pihak ketiga yang dapat melibatkan salah satu pihak dalam perang melawan pihak lainnya. Terakhir terdapat ketentuan tentang kapal Ternate dan kapal asing serta cara menangani kargo yang dinyatakan selundupan oleh VOC.¹³

Abu Kasim, yang menandatangani kontrak atas nama Banggai, meninggal di Bacan; tidak diketahui apa yang dilakukannya di sana, tetapi kemungkinan ia berkunjung untuk tujuan persahabatan. Bagaimanapun, ia tidak meninggal di sana sebagai orang buangan.¹⁴

Dari abad-abad sebelumnya, kita memiliki informasi samar bahwa pangeran Banggai menawarkan bantuan kepada Sultan Jailolo melawan Portugis tetapi karena kita tidak tahu apa atau siapa yang dimaksud dengan pangeran itu, kita tidak dapat menarik kesimpulan apa pun dari sini terkait seluruh kerajaan.

Kontak lain dikatakan telah ada dengan Goa (Makassar) yang pada zaman dahulu memberikan pengaruh hingga Vogelkop dan yang memiliki seorang gubernur di Balantak dengan gelar *suro*; dengan satu atau lain cara (mungkin sebagai akibat dari perjanjian Bonggaai?) pangeran Goa menyerahkan wilayah ini kepada Banggaier.¹⁵

Pada abad sebelumnya Bone berusaha meningkatkan pengaruhnya di sepanjang pantai timur Sulawesi. Misalnya, Van der Hart¹⁶ menyebutkan sahbandar Bugis di Mendono dan Balantak; De Clercq menyatakan bahwa klaim yang dituduhkan oleh Bone atas wilayah

¹² Goedhart, *Drie landschappen*, hlm. 471.

¹³ Memorie.

¹⁴ Kruyt, *Vorsten*, hal. 525.

¹⁵ Memorie.

¹⁶ Van der Hart, *Reize*, hlm. 98, lih. juga hlm. 106.

Ternate di Banggai dan Bungku ditolak karena dianggap ilegal oleh pemerintah pada tahun 1851.¹⁷ (Apakah Bone mendapatkan klaimnya mengenai Banggai dari pangeran Banggai yang memberontak, Agama, yang kemudian menjadi mumbu doi Bugis, yang telah melarikan diri ke negara itu pada tahun 1847? Arum Pugi di Bone saat itu ada di mana-mana dan berusaha memperluas wilayah kekuasaannya.).¹⁸

Apakah pernyataan Riedel bahwa para pangeran Mandar yang bersatu dengan Parigi pada tahun 1772 menyerang Banggai dan Kepulauan Sula dapat mengklaim keakuratan sejarah, saya tidak tahu; Tradisi Banggai tidak menyimpan kenangan apa pun tentang peristiwa ini.¹⁹ (Sejauh menyangkut penanggalan, kita hampir tidak dapat menghubungkannya dengan jatuhnya Bebungketan meskipun orang-orang dari Palu, Sulawesi Tengah, juga disebutkan di antara para pengepung; bandingkan hlm. 22).

Namun, wilayah Banggai telah berulang kali menjadi sasaran serangan oleh bajak laut Tobelo dan bajak laut lainnya, yang seringkali menembus jauh ke dalam negeri, membakar, dan menjarah. Karena alasan ini, pusat-pusat komunitas regional, baik di Kepulauan maupun di daratan, dikelilingi oleh tembok batu, yang sisa-sisanya masih menunjukkan kota dari zaman kuno; tembok-tembok ini biasanya dibangun di tempat-tempat yang ditandai dengan baik untuk pertahanan karena medannya. Jika ada perampok yang dilaporkan, anggota masyarakat hukum akan berkumpul di dalam benteng dan semua orang akan ditugaskan untuk melakukan pertahanan yang biasanya sia-sia melawan orang Tobelo yang jauh lebih berani dan agresif. Benteng juga ditemukan di

komunitas pertanian; benteng-benteng ini dibangun di sekitar satu atau lebih rumah tetapi tentu saja sifatnya lebih sementara. "Tentara" yang dulunya terdapat di beberapa kota (Batui, Tangkiang, Kintom, Mendono), yang terdiri dari sekitar empat puluh prajurit dan beberapa perwira, menurut pendapat saya bertugas bukan hanya untuk mempertahankan kota (yang bagaimanapun juga, didedikasikan untuk semua prajurit yang bertempur di masa bahaya) melainkan untuk memeriahkan acara-acara penting seperti perayaan keagamaan besar atau perayaan lainnya (misalnya pemindahan benda-benda pusaka di Kintom harus selalu diiringi oleh apa yang disebut kabesaran, pasukan prajurit yang menampilkan tarian perang).

Sungguh mengherankan bahwa dalam invasi semacam itu tidak pernah terjadi aksi bersenjata gabungan melawan para penyusup dan bahwa pemerintah pusat kerajaan juga tidak mengambil inisiatif. Posisi keraton Banggai yang terisolasi (lihat hlm. 129) tentu saja merupakan penyebab yang lebih dalam, tetapi mungkin juga sikap para pejabat Ternate, yang (menurut pernyataan Van der Hart)²⁰ sendiri bekerja sama dengan para bajak laut.

Satu-satunya pernyataan samar mengenai aksi gabungan melawan bajak laut berasal dari paruh kedua abad sebelumnya, ketika sebuah armada konon telah dibentuk di Banggai. Sebagian besar kepala daerah Peling menyediakan kapal dan awak kapal, dan Liang khususnya berperan aktif; armada gabungan ini konon berlayar ke Kepulauan Bwokon dan mengusir pasukan Tobelo di sana.²¹ Saya mengunjungi tempat di mana, menurut tradisi, jenazah orang Tobelo yang terbunuh telah di-

¹⁷ De Clercq, *Ternate*, hlm. 180.

¹⁸ J. A. Bakkers, *Het leenvorstendom Bone*, T.B.G. 15 (1866), hlm. 7.

¹⁹ J. G. E. Riedel, *De ligging der Mandaren in de*

Tominiboht, T.B.G. .. XIX (1870), hlm. 555.

²⁰ Van der Hart, *Reize*, hlm. 90.

²¹ *Memorie*.

buang dan memang ditemukan banyak sisa-sisa manusia di sana.

3. *Konsekuensi posisi Banggai sebagai vasal Ternate.*

Bahwa Banggai telah berada di bawah supremasi Ternate (yang kami nyatakan terjadi sekitar tahun 1580) memiliki konsekuensinya. Beberapa kali sekelompok orang Banggai (diperintahkan oleh pangeran?) berpartisipasi aktif dalam ekspedisi Ternate. Dalam Kronik Ternate karya Naidah, disebutkan²² bahwa pada masa Sultan Mandarsah Ternate (1648-1675), Kapitan Laut Ali dari Ternate berperang dengan kerajaan Goa; ia menerima kora-kora dan tujuh puluh orang dari Banggai, di antaranya. Uraian yang gamblang tentang upacara penyambutan utusan sultan tersebut di Banggai juga dapat ditemukan dalam Kronik Ternate ini.

Keterlibatan Banggai dalam ekspedisi disiplin Ternate melawan Bungku yang pemberontak sudah ada sejak abad sebelumnya; kelanjutan pernyataan bahwa segala sesuatu di Peling dan negorijen setia Kintom dan Mendono pasti telah dijarah oleh honggi Ternate tidak dapat dipahami (1841).²³

Sehubungan dengan ini, perlu disebutkan upaya beberapa pangeran Banggai untuk menarik diri dari kekuasaan Ternate (1829: perlawanan oleh Atondeng; ia menolak membayar upeti; 1847: perlawanan oleh Raja Agama, yang juga ingin merdeka).²⁴ Mengenai pemberontakan tahun 1829 perlu disebutkan bahwa Banggai awalnya telah meyakinkan dirinya sendiri tentang kerja sama semua (?) kepala daerah, tetapi mereka, kecuali *bosanyo* Batui (kerabat dekat pangeran), membelot ketika

pasukan Ternate (terutama Tobelo) mendekat.²⁵ Hal yang juga patut dicatat dalam pemberontakan kedua adalah bahwa *basalo* Liang (yang konon memiliki hubungan keluarga dengan keluarga sultan Tidore) bertempur di pihak para pengepung; mungkin juga para pemimpin lainnya. Bantuan orang-orang Bugis dari Togean juga patut disebutkan di sini. Sikap mereka tampak ambigu, karena beberapa orang berbicara tentang bantuan yang mereka berikan kepada para pengepung; di sisi lain, dapat dipastikan bahwa merekalah yang membantu sang pangeran melarikan diri, pertama ke Tojo, dan kemudian ke Bone. (Bantuan yang diberikan pada saat itu merupakan penyebab langsung terbentuknya komunitas hukum Bugis di Bunta; lihat hlm. 48).

Akibat subordinasi Banggai terhadap Ternate adalah tercapainya dua kontrak dengan VOC, yaitu pada tanggal 26 Januari 1689 dan 9 November 1741;²⁶ setelah pemberontakan Sultan Amsterdam dari Ternate dan penyerahannya (1683) harta benda Sultan Ternate dikembalikan kepadanya dalam bentuk fief oleh Kompeni; tetapi Kompeni ingin segera mengincar wilayah yang baru diperolehnya tersebut dan oleh karena itu mengirimkan sejumlah komisariss ke Kepulauan Banggai pada akhir tahun 1688.

Isi kontrak-kontrak tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu yang mengutamakan kepentingan VOC, kepentingan Sultan Ternate, dan kepentingan VOC bersama Sultan. Kategori pertama mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemusnahan pohon berangan kuda dan pohon pala, monopoli cangkang kura-kura dan sarang burung walet serta bantuan yang akan diberikan kepa-

²² Naidah, *Geschiedenis van Ternate*, Bijdr. T. L. & V., 43, vlgr. 2, hlm. 450; 455.

²³ De Clercq, *Ternate*, hlm. 177.

²⁴ De Clercq, *Ternate*, hlm. 175; 178.

²⁵ *Kruyt, Vorsten*, hlm. 526.

²⁶ *Corpus Diplomaticum Neerlandico Indicum*, bagian 111 no. DXIV dan bagian V no. DCCCLXIV.

da Kompeni dalam perang di Sulawesi, Maluku, dll. Selain itu, VOC berhak membangun benteng di wilayah Banggai, sementara ditetapkan lebih lanjut bahwa "raja dan bangsawannya" menempatkan diri di negara-negara dan rakyat yang berada di bawah kekuasaan dan perlindungan Kompeni.

Kategori berikutnya diwakili oleh pasal 26 dari kontrak tertua, yang menetapkan bahwa pangeran Banggai harus memberikan "homa-gium" tahunan kepada sultan, dan "hadiah" atau "untuk mengirimkan donasi atau upeti" sebagaimana mestinya dan lazim (lih. juga hlm. 129).

Kelompok ketiga kita temukan dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pengangkatan pangeran, bangsawan, bobato, dan bahkan "senghadje" (sangaji) Banggai; kemungkinan bahwa pangeran Banggai dapat digulingkan "jika terjadi pelanggaran"; dan deklarasi kesetiaan kepada Kompeni dan Sultan Ternate.

Apakah memang tidak mungkin bagi pangeran Banggai untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan kontrak pertama, sehingga pada tahun 1741 ia harus meminta seorang kopral dengan empat orang ditempatkan di Banggai untuk membantunya dalam pelaksanaan perjanjian ini? (pasal 27).

4. Pembentukan otoritas Belanda.

Laporan Kolonial 1909/1910 menyebutkan perlawanan pasif oleh Pemerintahan Sendiri Banggai pada awal 1908, ketika pemisahan diri Ternate belum menjadi kenyataan; petunjuk dan saran yang diberikan oleh pemerintah Eropa diabaikan. Namun, hal ini segera membaik berkat penempatan garnisun militer kecil di Banggai. Pada tahun-tahun berikutnya, kita menemukan penyebutan sporadis tentang perlawanan lokal lebih sebagai akibat dari tindakan gerombolan perampok daripada karena

ketidakpuasan penduduk. Dalam beberapa kesempatan, patroli militer harus mengambil tindakan.

Di Daratan, lebih banyak perlawanan ditemui. Perlawanan dimulai pada tahun 1908; orang-orang dari Mantang, salah satu desa Duhian di dataran, telah membunuh delapan orang dari wilayah Tojo; penyebab serangan pengayauan ini kemungkinan besar adalah penyeberangan perbatasan saat mencari rotan (lih. hlm. IV). Sebuah patroli militer dari Poso datang ke wilayah-wilayah ini karena tampaknya Mantang tidak mau membayar denda yang dijatuhkan. Sekianlah Laporan Kolonial 1908/1909. Kelanjutan ekspedisi militer ini tidak begitu berhasil. Mungkin orang-orang dari Lingketing memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat orang-orang dari Duhian curiga kepada komandan patroli dengan mengatakan bahwa komandan tersebut akan memulai perlawanan. Selama perjalanan selanjutnya melalui Lingketing ke Baloa, beberapa pemimpin kelompok terkemuka dari suku Duhian ditangkap dan seperti yang dikatakan dibaringkan karena mencoba melarikan diri atau karena perlawanan. Hal ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi kelompok Duhian sehingga sebagian besar mundur ke pedalaman yang sulit dijangkau dan baru didaftarkan dengan susah payah. Selama bertahun-tahun, masalah ini diperjuangkan hingga Laporan Kolonial 1921/1922 melaporkan bahwa salah satu kepala suku yang berkelana telah melapor secara sukarela kepada pemerintah. Namun, jika kita memiliki gambaran lengkap tentang sejarah ini, tampaknya penduduk pegunungan yang tidak bersalah diburu tanpa ampun selama bertahun-tahun seperti binatang buas; terutama beberapa komandan militer tingkat rendah yang berperilaku tidak pantas.

Akibat dari semua ini adalah bahwa sebagian dari *mian Duhian* yang menyebut diri

mereka Kohumamahon, tidak terdaftar hingga tahun 1938 dan selalu dijauhkan dari pemerintah. Peristiwa tahun 1908, penangkapan dan kematian beberapa pemimpin terkemuka *mian Duhian*, dinyanyikan dalam sebuah karya sastra Indonesia yang luar biasa, "*Koloi talenga*" (madi: nyanyian para pemimpin) yang menceritakan kematian tragis para *talenga*; yang lebih parah lagi dalam puisi tersebut (penulisnya adalah seorang *mian Duhian* bernama Ligis) kemarahan dan kebencian terlihat jelas dan sebagian besar *mian Duhian* masih dipenuhi ketidakpercayaan terhadap pemerintah Belanda. "*Koloi talenga*" dicatat oleh Tangkilisan dalam sebuah kunjungan ke Duhian setelah ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari beberapa tetua setelah berminggu-minggu.

Kebetulan, pembentukan otoritas Belanda dicapai tanpa pertumpahan darah.